

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN JAMBAN UNTUK KEBERLANJUTAN SANITASI

Suning¹, Pungut² dan Rani Kurnia Putri³

Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota¹, Dosen Teknik Lingkungan², Dosen Pendidikan Matematika³
Universitas PGRI Adi Buana
suning@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi kebijakan agar masyarakat pesisir menggunakan jamban komunal sebagai tempat buang air besar, sehingga sanitasi dapat berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif, dengan teknik analisis hierarki proses. Pengambilan data dilakukan dengan fokus groups diskusi kepada responden terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima (5) aspek yang mempengaruhi adanya peningkatan penggunaan jamban komunal, yaitu aspek teknis lingkungan, kelembagaan, pembiayaan, pemerintah dan peran serta masyarakat. Strategi kebijakan yang dihasilkan menunjukkan bahwa kebijakan 1 dengan nilai CR sebesar 329,2 yaitu meningkatkan penggunaan sanitasi jamban dengan melakukan strategi; membuat desain jamban lebih menarik, fasilitas jamban ada musiknya dan tidak dipungut biaya jika menggunakan. Kebijakan 2 dengan nilai CR sebesar 270,8 yaitu meningkatkan promosi kesehatan lingkungan dengan melakukan strategi; sosialisasi tentang kesehatan, pemberian pemahaman sadar lingkungan dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang BABS. Kata kunci: Analisis hierarki proses, Jamban komunal, Masyarakat Pesisir, Strategi Kebijakan

ABSTRACT

This study aims to determine the policy strategy for coastal communities to use communal latrine as a place to defecate, so that sanitation programs can be sustainable. The research method used descriptive qualitative and quantitative with analytical hierarchy process. Data collection was done with focus group discussion to selected respondents. The results showed that there were five (5) aspects that influenced the increasing use of communal latrine, i.e environmental technical aspects, institutional, financing, government and community participation. The resulting policy strategy shows that the first policy with CR value of 329.2 is improving the use of sanitary privy by conducting a strategy; make the toilet design more attractive, there is no music toilet facilities and free of charge when using. The second policy with CR value of 270.8 is to improve the promotion of environmental health by conducting a strategy; socialization on health, provision of environmental awareness and sanction for BABS community.

Keyword: Analytical Hierarchy Proses, Communal Latrine, Coastal Communities, Policy Strategi

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mengamanatkan adanya pencapaian 100% akses (universal access) air minum dan sanitasi. Membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan implementasi komitmen pemerintah untuk meningkatkan universal access air minum dan sanitasi, maka Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 melakukan kegiatan penyusunan dokumen

perencanaan sanitasi yaitu dokumen pemutakhiran Strategi sanitasi Kabupaten (SSK). Salah satu kajian yang dibahas didalam dokumen SSK adalah studi EHRA (Environmental Health Risk Assesment).

Hasil studi EHRA secara umum di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa permasalahan besar yang menjadi persoalan untuk segera ditangani adalah air limbah domestik, PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), persampahan dan sumber air genangan. Secara spesifik permasalahan

tersebut terjadi di kawasan pesisir. Terdapat beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Sidoarjo salah satunya pesisir yang ada di Kecamatan Sedati. Kecamatan Sedati masuk dalam Zona 3 yaitu area dengan tingkat resiko tinggi karena merupakan kawasan padat, CBD serta kondisi topografi kurang menguntungkan. Sehingga kondisi sanitasi dalam jangka pendek masih bisa menggunakan system on site berbasis rumah tangga, dalam jangka menengah harus diatasi dengan pilihan system terpusat (on site), dan dalam jangka panjang dengan off site tidak terpusat. (EHRA, 2015).

Secara geografis kawasan pesisir merupakan daerah dengan daratan rendah ketinggian rata-rata mencapai 4 m diatas permukaan laut (dpl) dengan luas wilayah sebesar 79,26 Km², memiliki 16 desa, 155 RW, 432 RT dan 26.226 KK. Kawasan pesisir Sedati yang diteliti hanya 5 (lima) desa pesisir yaitu desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Gisik Cemandi, Banjar Kemuning dan desa Segorotambak. Selain masuk dalam Zona 3 area resiko tinggi, dalam SK Bupati Sidoarjo No. 188/452/404.1.3.2/2015 disebutkan bahwa kawasan pesisir tersebut masuk dalam kategori lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh (Laporan Bappeda Sidoarjo, 2010). Aksesibilitas pesisir Sedati jauh dari kota sehingga pelayanan infrastruktur kurang optimal dan pada akhirnya kondisi infrastruktur tidak berkelanjutan. Infrastruktur tersebut salah satunya adalah sanitasi jamban.

Suning dan Pungut (2017) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakberlanjutan sanitasi di kawasan pesisir disebabkan oleh; (1) Jamban umum di bangun jauh dari permukiman, sehingga masyarakat malas jika hendak menggunakan jamban umum, (2) Tidak tersedia fasilitas Air Bersih, sehingga tidak terjaga kebersihan jamban hal ini menjadikan masyarakat tidak mau BAB ke jamban umum, (3) Tidak ada kelembagaan yang bertugas mengelola jamban umum sehingga kebersihan tidak terjaga, (4) Tidak ada pengecekan rutin terkait pemeliharaan jamban umum setiap 6 bulan sekali dari pihak pemerintah, yang mana hal ini penting dilakukan agar pemerintah mengetahui keberadaan jamban apakah berfungsi atau tidak dan pemerintah

juga perlu melakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan secara rutin agar kebiasaan masyarakat BABS tidak terjadi lagi.

Merujuk pada kondisi empiris dan hasil studi yang telah dihasilkan, maka menentukan strategi kebijakan untuk meningkatkan penggunaan jamban agar berkelanjutan penting untuk dilakukan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan FGD (Focus Groups Discussion) dan wawancara kepada responden terpilih. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis hierarki proses (AHP). AHP merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan (Januar, 2000). Konsep dasar AHP adalah suatu hierarki fungsional dengan input utama yang diperoleh dari persepsi responden terpilih yang ahli dan memahami kondisi empiris suatu lokus yang diteliti. Output AHP dihasilkan dengan menggunakan software Expert Choice 11.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek yang berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan jamban

Penelitian ini menggunakan 5 (lima) aspek sebagai dasar untuk mengetahui pengaruh adanya peningkatan penggunaan jamban. Penentuan aspek diperoleh dari hasil identifikasi awal di lapangan. Lima aspek tersebut adalah; aspek teknis lingkungan, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek pemerintah dan aspek peran serta masyarakat.

1. Aspek Teknis Lingkungan

Berdasarkan hasil FGD yang melibatkan stakeholders (Kepala Kecamatan Sedati dan Kepala Desa wilayah penelitian) dan tokoh masyarakat sebanyak 14 responden, dari 9 responden menyatakan bahwa diwilayah mereka sudah disediakan fasilitas sanitasi/ MCK umum sedangkan 5 responden menyatakan bahwa diwilayah mereka belum disediakan fasilitas MCK umum.

2. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan yang bertugas menangani sanitasi jamban. Berdasarkan hasil FGD didapat bahwa belum ada anggaran yang dianggarkan secara khusus untuk kelembagaan dalam bidang sanitasi. Kelembagaan ini secara keorganisasian berfungsi untuk mengawasi jalannya program pemerintah terhadap pengadaan jamban.

Keberadaan jamban menjadi tanggungjawab penuh kelembagaan, baik tentang siapa yang bertugas menjaga kebersihan, bagaimana ketersediaan airnya, kebersihannya dan yang lainnya. Secara formal kelembagaan ini dibentuk oleh pemerintah daerah dengan struktur keanggotaan dari perangkat desa maupun paguyuban masyarakat pesisir yang memiliki kemauan untuk memelihara, merawat dan menjaga keberadaan jamban. Sebagaimana keberhasilan program STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) secara kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Priatno, Teguh, *et al.*, 2014).

3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan menjadi salah satu faktor penentu keberlanjutan sanitasi jamban. Jamban umum disediakan dengan tujuan untuk mengurangi kebiasaan negatif masyarakat pesisir yang buang air besar sembarangan (BABS). Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakannya. Pembiayaan ini secara teknis digunakan untuk biaya operasional keberadaan jamban. Pembiayaan dapat diperoleh dari dana desa, dana dari dinas terkait maupun dari anggaran lainnya yang dapat dipergunakan. Kebiasaan BABS menjadi faktor utama masyarakat untuk tidak ikut partisipasi dalam perawatan jamban karena sebagian besar dari mereka lebih nyaman BAB sembarangan jika dibandingkan dengan BAB di jamban umum yang telah disediakan.

4. Aspek Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang dominan dalam menentukan strategi

kebijakan untuk meningkatkan penggunaan jamban agar berkelanjutan, oleh karena itu pihak pemerintah dituntut aktif dalam hal pengawasan keberlanjutan jamban diantaranya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang sadar lingkungan, kesehatan, perawatan jamban dan membentuk kelembagaan yang dikhususkan membantu pemerintah dalam menjalankan tugas mengawasi dan mengkoordinasi perawatan jamban.

Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa BABS baik di tambak, sumur maupun sungai dapat menyebabkan banyak hal terkait dengan penyakit dan pencemaran lingkungan lainnya. Dengan keikutsertaan dan campurtangan pemerintah dalam hal mengurangi kebiasaan buruk masyarakat pesisir sedikit membantu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan terutama kebersihan jamban. Sejalan dengan hasil penelitian yaang dilakukan oleh Katukiza, *et al.*, (2010) bahwa keberlanjutan sanitasi dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah maupun stakeholder, masyarakat dan teknologi. Pihak pemerintah maupun stakeholder harus rutin melakukan pengecekan ke lapangan minimal 6 bulan sekali dengan tujuan agar jamban umum yang dibangun terfungsikan dengan baik, terjaga kebersihannya, tidak mudah rusak dan yang paling penting adalah pemerintah memberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan sehingga kebiasaan masyarakat untuk BABS dapat berkurang.

5. Aspek Peran serta Masyarakat

Masyarakat masih beranggapan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap keberadaan jamban adalah pihak pemerintah atau lembaga yang dibentuk, sehingga ada kecenderungan masyarakat kurang peduli terhadap pemeliharaan jamban. Akibatnya prasarana sanitasi yang sudah dibangun

tidak mampu bertahan lama dan bahkan masyarakat kurang optimal memanfaatkannya dan kebiasaan untuk BABS dengan berbagai faktor masih terjadi.

meningkatkan penggunaan jamban agar sanitasi berkelanjutan, maka lima (5) aspek yang telah teridentifikasi dan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya kemudian dilakukan pembobotan secara hirarki dengan menggunakan teknik analisis hierarki proses (AHP) dengan software expert choice 11. Hasil AHP diuraikan pada penjelasan berikut.

Strategi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Jamban Untuk Keberlanjutan Sanitasi

Untuk mendapatkan strategi kebijakan apa yang harus dilakukan guna

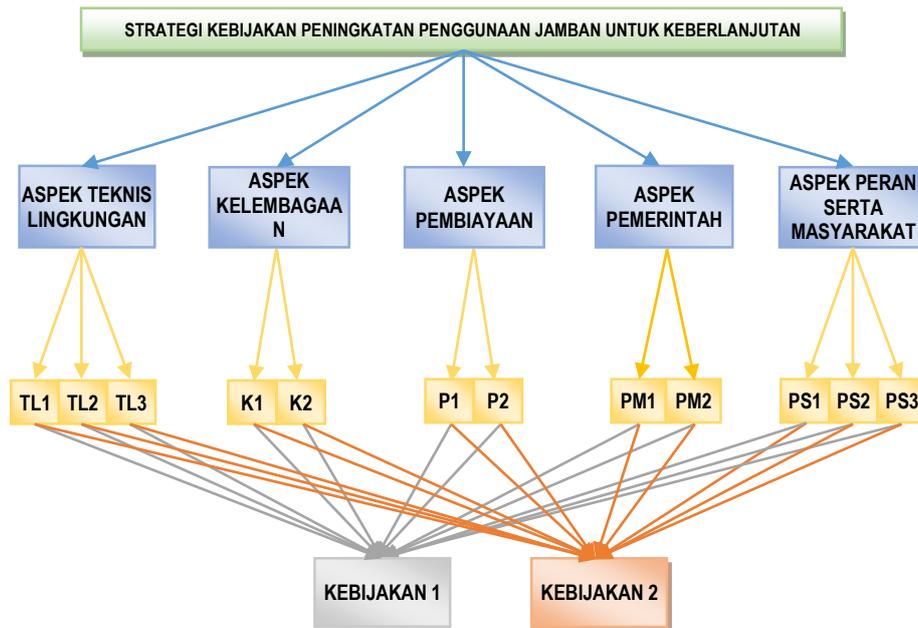
Tabel 1. Identifikasi Kriteria dan Sub Kriteria

Kriteria	Sub Kriteria
Teknis Lingkungan	TL.1 Fasilitas MCK TL.2 JENIS Jamban TL.3 Lokasi BAB
Kelembagaan	K.1 Keberlanjutan Fungsi MCK K.2 Mengkoordinasi Perawatan MCK
Pembiayaan	P.1 Tarif MCK P.2 Iuran Perawatan MCK
Pemerintah	PM.1 Penyediaan Fasilitas MCK Pribadi PM.2 Sosialisasi Perawatan MCK Umum
Peran Serta Masyarakat	PS. 1 Menjaga Kondisi MCK PS. 2 Merawat Kebersihan MCK PS. 3 Kemauan Menggunakan Fasilitas MCK

Sumber : Hasil Analisa, 2018

Tabel 1 menunjukkan adanya aspek atau kriteria dengan sub kriterianya untuk dibandingkan dengan pasangan pada setiap level untuk mendapatkan prioritas strategi kebijakan. Masing-masing kriteria dan sub

kriteria akan memberikan nilai yang berbeda sesuai dengan hasil input kuesioner responden yang telah diisi sesuai dengan tingkat kepentingannya setiap kriteria dan sub kriteria.



Gambar 1. Penentuan Strategi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Jamban Untuk Keberlanjutan Sanitasi

Tabel 1 dan Gambar 1 dilakukan dengan teknik AHP menggunakan program komputer (expert choice 11) dan merupakan hasil kompilasi dari seluruh responden terkait dengan strategi kebijakan peningkatan penggunaan jamban, sehingga didapatkan kesimpulan:

1. Berdasarkan perbandingan berpasangan pada level kriteria, diketahui nilai peran serta masyarakat memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya sebesar 0,312 dengan rasio inkonsistensi 0,09 lebih kecil dari 0,1.
2. Perbandingan berpasangan pada level sub kriteria teknis lingkungan yaitu perbandingan antara fasilitas MCK, jenis jamban dan lokasi BAB, maka nilai tertinggi yang artinya tingkat kepentingannya lebih penting adalah lokasi BAB dengan nilai sebesar 0,528 dan tingkat inkonsistensi sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,1.
3. Perbandingan berpasangan pada level sub kriteria kelembagaan yaitu perbandingan antara keberlanjutan fungsi MCK dan mengkoordinasi perawatan MCK, maka nilai tertinggi mengoordinasi perawatan MCK dengan nilai sebesar 0,750 dan tingkat inkonsistensi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,1.
4. Perbandingan berpasangan pada level sub kriteria pembiayaan yaitu

perbandingan antara tarif MCK dan iuran perawatan MCK, maka nilai tertinggi iuran perawatan MCK dengan nilai sebesar 0,667 dan tingkat inkonsistensi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,1.

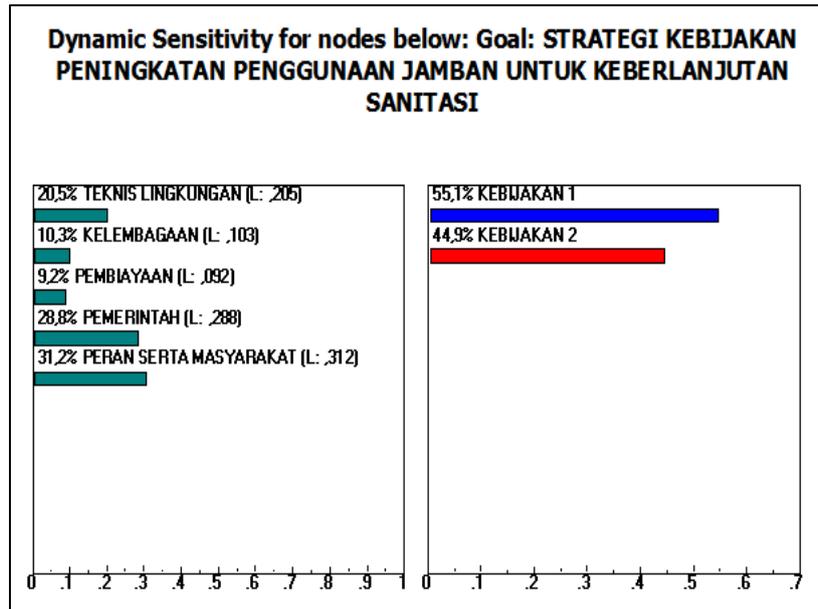
5. Perbandingan berpasangan pada level sub kriteria pemerintah yaitu perbandingan antara penyediaan fasilitas MCK pribadi dan sosialisasi penggunaan fasilitas MCK umum, maka nilai tertinggi yang artinya penyediaan fasilitas MCK pribadi sebesar 0,750 dan tingkat inkonsistensi sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,1.
6. Perbandingan berpasangan pada level sub kriteria peran serta masyarakat yaitu perbandingan antara menjaga kondisi MCK, merawat kebersihan MCK, kemauan menggunakan fasilitas MCK, maka nilai tertinggi yang artinya kemauan menggunakan fasilitas MCK dengan nilai sebesar 0,550 dan tingkat inkonsistensi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,1.

Hasil simpulan masing-masing kriteria dan sub kriteria kemudian dikompilasi untuk mendapatkan prioritas strategi kebijakan. Hasil kompilasi dengan menjumlahkan bobot rata-rata penilaian dari semua responden (Brojonegoro, Permadi, 1992), dihasilkan strategi sebagaimana pada Tabel 2 dan Gambar 2.

Tabel 2. Kompilasi Prioritas Startegi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Jamban

	CR 1 (goal)	CR 2 (teknis & lingkungan)	CR 3 (Kelembagaan)	CR 4 (Pembiayaan)	CR 5 (Pemerintah)	CR 6 (Peran Serta Masyarakat)	Jumlah	Prioritas
Kebijakan 1	55,1	47,8	38,5	69,2	65,6	53,0	329,2	1
Kebijakan 2	44,9	52,2	61,5	30,8	34,4	47,0	270,8	2

Sumber: Hasil analisa, 2018



Gambar 2. Kompilasi Masing-masing Aspek Terhadap Strategi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Jamban Untuk Keberlanjutan Sanitasi
Sumber : Hasil Analisa, 2018

Tabel 2 dan Gambar 2 dapat dirumuskan urutan kebijakan terkait Strategi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Jamban Untuk Keberlanjutan Sanitasi yaitu:

Kebijakan 1: Meningkatkan penggunaan sanitasi jamban, dengan strategi kebijakan; (1) Desain jamban harus menarik, (2) Fasilitas jamban ada musiknya, (3) Tidak dipungut biaya jika menggunakan.

Kebijakan 2: Mempromosikan kesehatan lingkungan, dengan strategi kebijakan; (1) Sosialisasi tentang kesehatan, (2) Pemberian pemahaman sadar lingkungan, (3) Pemberian sanksi bagi masyarakat jika BABS.

SIMPULAN

1. Aspek atau kriteria yang berpengaruh terhadap peningkatan penggunaan jamban berdasarkan perbandingan berpasangan pada level kriteria, diketahui nilai peran serta masyarakat memiliki tingkat kepentingan lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya sebesar 0,312 dengan rasio inkonsistensi 0,09 lebih kecil dari 0,1.
2. Prioritas strategi kebijakan untuk meningkatkan penggunaan jamban agar berkelanjutan dihasilkan bahwa kebijakan 1 dengan nilai CR sebesar

329,2 yaitu meningkatkan penggunaan sanitasi jamban dengan melakukan strategi; membuat desain jamban lebih menarik, fasilitas jamban ada musiknya dan tidak dipungut biaya jika menggunakan. Kebijakan 2 dengan nilai CR sebesar 270,8 yaitu meningkatkan promosi kesehatan lingkungan dengan melakukan strategi; sosialisasi tentang kesehatan, pemberian pemahaman sadar lingkungan dan pemberian sanksi bagi masyarakat yang BABS.

Saran

Peran serta masyarakat memiliki peran utama untuk keberlanjutan sanitasi, sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara kontinyu terkait dengan keberlanjutan sanitasi kepada masyarakat

1. Kebijakan dengan strategi yang dihasilkan dari penelitian ini hendaknya dapat diimplikasikan oleh pemerintah agar jamban yang disediakan tidak sia-sia.

DAFTAR RUJUKAN

Brojonegoro, B., & Permadi, B. (1992). "AHP" Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi. Jakarta : UI

- EHRA. (2015). Laporan Penyusunan Dokumen Studi EHRA Kabupaten Sidoarjo. Dokumen Bappeda
- Januar, Jani. 2000. Penerapan Analisis Hirarki Proses Dalam Kajian Komoditas Unggulan Pisang. *Jurnal Agribisnis*. Vol. IV, No. 1 Januari – Juni 2000
- Katukiza, A.Y., Ronteltap, M., Oleja, A., Niwagaba, C. B., Kansiime, F., Lens, P. N. L. (2010), Selection of Sustainable Sanitation Technologies for Urban Slum - A Case of B Waise III in Kampala, Uganda, *Journal Elsevier Science of The Total Environment* 409, p. 52-62.
- Priatno, Teguh, Zauhar, Soesilo dan Hanafi, Imam. (2014). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, Vol. 10. No. 2.
- Suning dan Pungut (2017). Evaluasi Ketidakberlanjutan Sanitasi Guna Mendukung Sanitasi Layak 2019. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Lingkungan Pascasarjana Universitas Diponegoro*